**LAMPIRAN D**

**PERSYARATAN UMUM**

**(*gENERAL tERMS & cONDITIONS*)**

**KONTRAK**

**NOMOR : A000000XXX/924/XXX/2022**

**TENTANG**

**JASA PENATAAN JALUR PEJALAN KAKI (WALKWAY) DI PABRIK FENI ANTAM UBPN KOLAKA**

**PASAL 1 - Definisi/ Istilah DAN PENAFSIRAN**

1. **DEFINISI/ISTILAH**

Dengan tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku, istilah-istilah yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. **”Kontrak**", berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2.1. Kontrak Utama.
2. “**Dokumen Korespondensi**”, berarti seluruh dokumen proses pengadaan, termasuk kesepatakan hasil negosiasi yang berhubungan dengan Pekerjaan.
3. **“Amandemen Kontrak”**, adalah perubahan terhadap Kontrak berupa penghapusan atau penggantian suatu ketentuan, yang dapat disertai dengan penambahan suatu ketentuan baru.
4. "**PIHAK PERTAMA**" adalah sebagaimana disebutkan pada Kontrak Utama.
5. “**Pekerjaan**” adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Kontrak Utama dengan ruang lingkup seperti pada Lampiran A Kontrak ini dan lampiran lain dari Kontrak (apabila ada).
6. "**Wakil/Perwakilan** **PIHAK PERTAMA**" berarti suatu entitas atau perorangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** yang bertindak sebagai wakil/perwakilannya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak kecuali terkait hal-hal yang menjadi kewenangan Pihak Komunikator (termasuk setiap (para) utusan yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh Wakil/Perwakilan **PIHAK PERTAMA**). Pada setiap saat dan dari waktu ke waktu **PIHAK PERTAMA** dapat mengganti Wakil/Perwakilan **PIHAK PERTAMA** dengan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.
7. "**Wakil/Perwakilan** **PIHAK KEDUA**" berarti suatu entitas atau perorangan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang bertindak sebagai wakil/perwakilannya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak kecuali terkait hal-hal yang menjadi kewenangan Pihak Komunikator (termasuk setiap (para) utusan yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh Wakil/Perwakilan **PIHAK KEDUA**). Pada setiap saat dan dari waktu ke waktu **PIHAK KEDUA** dapat mengganti Wakil/Perwakilan **PIHAK KEDUA** dengan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA.**
8. ”**PIHAK KEDUA**” adalah sebagaimana disebutkan pada Kontrak Utama.
9. ”**EPCC**” adalah Enginering, Procurement, Construction danCommissioning.
10. "**Perselisihan**" berarti perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** terkait dengan Kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Kontrak.
11. "**Subkontraktor**" berarti setiap orang atau badan usaha yang mengadakan kontrak dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan Kontrak ini.
12. “**Informasi Rahasia**” berarti semua informasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diungkapkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau yang diperoleh, diakses dan/atau diketahui oleh **PIHAK KEDUA** terkait, dalam rangka dan/atau untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak ini, atau informasi lainnya milik, mengenai dan/atau terkait **PIHAK PERTAMA** dan/atau afiliasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada data, laporan, ringkasan, catatan, analisis, gambar, kalkulasi, opini, peta, diagram dan laporan hasil studi atas wilayah potensial tertentu. Namun demikian, Informasi Rahasia tidak termasuk yang:
13. merupakan atau menjadi tersedia untuk publik, yang bukan diakibatkan karena kesalahan, kelalaian dan/atau kecerobohan dari **PIHAK KEDUA**, atau
14. diterima dari pihak ketiga independen yang telah memperoleh Informasi Rahasia tersebut secara sah menurut hukum sebelum tanggal Kontrak ini dan tidak berkewajiban untuk merahasiakan atau berkewajiban merahasiakan kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
15. telah dikembangkan secara independen oleh **PIHAK KEDUA** atau atas nama **PIHAK KEDUA** tanpa menggunakan dan yang tidak mengandung Informasi Rahasia
16. ”**Jangka Waktu Pelaksanaan** **Pekerjaan**” adalah jadwal yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang menunjukkan target waktu dan target tanggal yang diperlukan untuk menyelesaikan Pekerjaan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
17. “**Hari Kerja**” adalah hari Senin sampai Jumat di luar hari libur nasional, yang berlaku di Republik Indonesia.
18. **INTERPRETASI**

Dalam menginterpretasikan Kontrak ini, kecuali apabila dinyatakan lain secara tegas dalam Kontrak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Kata-kata yang menggunakan bentuk tunggal atau jamak juga mencakup bentuk jamak atau tunggal, berturut-turut;
2. Segala rujukan terhadap pasal dan lampiran adalah adalah rujukan terhadap pasal dan lampiran dari Kontrak ini kecuali ditentukan lain dalam Kontrak ini.
3. Segala rujukan dalam Kontrak ini terhadap suatu ketetapan, undang-undang, keputusan, peraturan, atau persyaratan hukum lainnya wajib diartikan sebagai rujukan terhadap ketetapan, undang-undang, keputusan, peraturan, atau persyaratan hukum lainnya tersebut sebagaimana ditetapkan kembali, diatur kembali, diubah, atau diperpanjang dari waktu ke waktu, kecuali apabila disyaratkan lain dalam Kontrak ini.
4. Daftar isi dan judul dalam pasal-pasal dan lampiran dari Kontrak ini dimaksudkan hanya untuk kemudahan dan tidak dalam hal apapun mempengaruhi arti atau maksud dari ketentuan yang diatur di dalamnya.
5. Rujukan terhadap suatu tindakan atau tidak bertindaknya **PIHAK KEDUA** berarti tindakan atau tidak bertindaknya **PIHAK KEDUA** dan/atau Subkontraktor dan/atau masing-masing pejabatnya, agen-agennya, pegawainya, perwakilannya, penerusnya dan pihak yang ditunjuknya. Untuk menghindari keragu-raguan, segala rujukan terhadap kalimat “**karena alasan / alasan-alasan yang diakibatkan oleh** **PIHAK KEDUA**” atau yang memiliki arti yang sama, dianggap memiliki arti dikarenakan alasan / alasan-alasan yang diakibatkan **PIHAK KEDUA** dan/atau Subkontraktor manapun dan/atau masing-masing pejabatnya, agen-agennya, pegawainya, perwakilannya, penerusnya dan yang pihak yang ditunjuknya.
6. Tidak ada ketentuan dalam Kontrak ini yang dimaksudkan untuk merugikan suatu **PIHAK** tersebut hanya berdasarkan alasan bahwa **PIHAK** tersebut adalah yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan Kontrak ini atau ketentuan yang dimaksud.
7. "**Berdasarkan Kontrak**" ini, "**pada Kontrak**", "**dalam Kontrak ini**" dan kata keterangan yang sejenis, kecuali jika ditentukan lain secara tegas demikian akan merujuk pada Kontrak secara keseluruhan;

**PASAL 2 - HUKUM YANG BERLAKU**

* 1. Kontrak ini akan ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
  2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak diperlukan penetapan pengadilan untuk pengakhiran Kontrak.

**PASAL 3 – KERAHASIAAN**

* 1. Informasi Rahasia wajib tetap dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, atau sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Kontrak ini, diungkapkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun, baik seluruh maupun sebagian dan Informasi Rahasia tersebut tidak akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA**, secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan apapun selain untuk tujuan pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak ini.
  2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menjadi secara hukum terpaksa atau diwajibkan oleh otoritas pemerintah yang mempunyai yurisdiksi terkait untuk mengungkapkan Informasi Rahasia, maka sebelumnya **PIHAK KEDUA** akan dengan secepatnya memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** akan bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** atas dasar yang layak untuk memperoleh perintah yang melindungi atau upaya lainnya. **PIHAK KEDUA** hanya akan menyediakan bagian dari Informasi Rahasia yang secara hukum harus diungkapkan sepanjang ada opini tertulis dari penasihat hukum dari yang diwajibkan untuk melakukan pengungkapan Informasi Rahasia tersebut dan **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan usaha-usaha yang layak untuk mendapatkan kepastian yang dapat diandalkan bahwa perlakuan memelihara kerahasiaan akan diberikan terhadap Informasi Rahasia yang disediakan tersebut.
  3. Pada waktu diakhirinya atau berakhirnya Kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** akan segera, dan dalam keadaan bagaimanapun, mengembalikan atau memusnahkan semua dokumen dan/atau salinan Informasi Rahasia kepada **PIHAK PERTAMA**, kecuali apabila ditentukan lain secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
  4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas, dan akan mengganti kerugian **PIHAK PERTAMA** atas segala akibat yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelanggaran atau ketidakpatuhan **PIHAK KEDUA** atas Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebocoran informasi dan/atau kerugian, yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan adanya pelanggaran setiap pernyataan, jaminan, dan/atau janji yang diatur dalam Pasal 3 Lampiran ini. Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** tersebut dalam Pasal ini tetap berlaku walau Kontrak ini telah berakhir.
  5. **PIHAK KEDUA** menyetujui bahwa **PIHAK PERTAMA** dan afiliasi dari **PIHAK PERTAMA** tidak memiliki tanggung jawab, baik langsung maupun tidak langsung, kepada **PIHAK KEDUA** yang merupakan hasil dari penggunaan Informasi Rahasia oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali berdasarkan pernyataan dan jaminan khusus yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan Kontrak.
  6. **PIHAK KEDUA** tidak dapat dan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, mengungkapkan kepada pihak lain hal-hal tersebut dan/atau yang dimaksud dalam Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada fakta bahwa Informasi Rahasia telah tersedia, bahwa Kontrak ini ditandatangani, bahwa pembahasan-pembahasan atau negosiasi-negosiasi sedang berlangsung atau telah dilangsungkan pembahasan berkenaan dengan pelaksanaan Kontrak yang mungkin, atau setiap ketentuan-ketentuan, kondisi-kondisi atau fakta-fakta lainnya mengenai setiap pelaksanaan Kontrak yang mungkin tersebut, termasuk status dari pelaksanaan Kontrak tersebut.
  7. Ketentuan dalam Pasal 3 ini juga berlaku bagi seluruh organ dan pegawai **PIHAK KEDUA**, Wakil **PIHAK KEDUA**, dan mereka yang ditugaskannya dalam pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak ini untuk mewakili, bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**.
  8. Jika **PIHAK KEDUA** perlu mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain, termasuk kepada Subkontraktornya, **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin pihak tersebut, termasuk Subkontraktor akan mematuhi ketentuan dalam Pasal ini dan menandatangani perjanjian kerahasiaan atas Informasi Rahasia dengan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan yang tidak lebih ringan daripada yang diatur dalam Kontrak ini, dan akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai setiap perjanjian kerahasiaan tersebut. Jika **PIHAK KEDUA** gagal untuk memperoleh perjanjian kerahasiaan tersebut, **PIHAK KEDUA** memahami bahwa **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak-pihak tersebut dan pengungkapan yang demikian, merupakan pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal ini. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tetap bertanggunjawab atas segala akibat yang muncul karena atau terkait dengan pelanggaran pihak ketiga tersebut atas ketentuan dalam Pasal ini.
  9. Kewajiban atas kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Kontrak ini telah berakhir atau diputus sebelum waktunya. **PIHAK KEDUA**, agen‑agennya, pegawai-pega­wai­nya dan mereka yang ditugaskannya tidak akan mengizinkan setiap orang, selain **PIHAK PERTAMA** atau mereka yang ditunjuknya, untuk dapat menggunakan Informasi Rahasia dan tidak akan membocorkan sesuatu Informasi Rahasia yang berhubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak dan mereka tidak akan meng­ambil suatu keuntungan darinya.
  10. Ketentuan‑ketentuan di atas tidak hanya ber­laku terhadap aslinya tetapi juga terhadap reproduksi-reproduksi, salinan-salin­an, dan sejenisnya. Semua ketentuan demikian akan berlaku terus melewati masa Kontrak ini.

**Pasal 4 - TANGGUNG JAWAB**

* 1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, perlengkapan dan metode yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kontrak ini. Apabila terdapat klaim, gugatan, tuntutan dan/atau kerugian **PIHAK PERTAMA** yang timbul akibat penggunaan peralatan, perlengkapan dan/atau metode tersebut, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan dimaksud atas biayanya serta bertanggungjawab atas kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA.**
  2. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari klaim, gugatan, tuntutan dan kerugian **PIHAK PERTAMA** yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini oleh **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain yang bekerja untuk atau bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** (termasuk dalam hal akibat pelanggaran Kontrak ini oleh **PIHAK KEDUA**). Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menerima klaim, gugatan, tuntutan dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud, maka **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hal tersebut atas biaya dan tanggungannya, dan memberikan ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** mengalami kerugian.
  3. **PIHAK KEDUA** wajib sepenuhnya membela, melin­dungi, mengganti rugi, dan membebaskan **PIHAK PERTAMA**, afiliasi **PIHAK PERTAMA,** dan pega­wai‑pegawainya serta agen-agennya masing-masing, dari maupun terhadap setiap dan semua tuntutan, permintaan atau gugatan, keputus­an, dan setiap tanggung jawab, biaya, pengeluaran atau kewajiban lain karena kerugian (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya pengacara, biaya-biaya Pengadilan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam membela **PIHAK PERTAMA**) akibat kerusakan atau kerugian harta benda atau cedera atau kema­tian dari setiap orang, termasuk pegawai-pegawai dan hak milik **PIHAK KEDUA**, yang timbul karena atau secara bagaimanapun bertalian dengan atau sehubungan dengan pelaksanaan Peker­jaan, kecuali yang secara nyata diakibatkan semata‑mata karena kelalaian **PIHAK PERTAMA**;

**PASAL 5 - PENGALIHAN KONTRAK**

* 1. **PIHAK PERTAMA** hanya dapat mengalihkan Kontrak ini kepada pihak laindengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu disertai dengan alasan yang wajar kepada **PIHAK KEDUA.**
  2. **PIHAK KEDUA** dilarang untuk mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA.**
  3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab, melepaskan dan mengganti rugi **PIHAK PERTAMA** dari segala akibat terkait dengan pengalihan Kontrak ini, termasuk berupa klaim, gugatan, tuntutan dan kerugian dari pihak manapun, termasuk dari Subkontraktor **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6 - KELALAIAN DAN KESALAHAN**

* 1. Jika **PIHAK KEDUA**:

1. menunda atau mengakibatkan tertundanya sebagian atau seluruh Pekerjaan, atau menurut pendapat **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** mengabaikan atau tidak mampu memulai atau melanjutkan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak; dan/atau
2. tidak mampu melaksanakan Pekerjaan pada tingkat kemajuan yang dapat diterima **PIHAK PERTAMA**; dan/atau
3. tidak mampu melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati didalam Kontrak; dan/atau
4. mengabaikan atau lalai melaksanakan ketentuan Kontrak, atau melaksanakan ketentuan Kontrak tidak dengan sebagaimana mestinya, atau tidak melaksanakan setiap perintah atau persyaratan **PIHAK PERTAMA** atau Wakil **PIHAK PERTAMA** yang diberikan sesuai dengan Kontrak; dan/atau
5. tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan dalam waktu atau waktu‑waktu yang telah ditentukan dalam atau berdasarkan Kontrak; dan/atau
6. melakukan pelanggaran terhadap atau dalam segala hal tidak mampu memenuhi atau mematuhi ketentuan setiap persyaratan Kontrak atau ketetapan Kontrak; dan/atau
7. mengisyaratkan bahwa ia tidak mampu atau tidak bersedia menyelesaikan Pekerjaan; dan/atau
8. tidak mempertahankan jaminan, termasuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, termasuk dalam hal memperpanjang jangka waktu maupun menambah jumlah jaminan tersebut; dan/atau
9. mengundurkan diri selama jangka waktu Kontrak; dan/atau
10. menjadi pailit atau melaksanakan pelimpahan harta miliknya untuk kepentingan para kreditornya atau melaksanakan penataan kembali atau pengaturan kembali dengan para kreditornya atau dilikuidasi (kecuali untuk tujuan rekonstruksi) atau mulai menjalankan usaha di bawah pengawasan kurator;

maka, dengan tetap tunduk pada Pasal 11 Lampiran B Kontrak ini, **PIHAK PERTAMA** dapat menunda pembayaran berdasarkan Kontrak (penundaan mana bukan merupakan pelanggaran dari Kontrak ini) dan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan **Surat Peringatan** kepada **PIHAK KEDUA** agar **PIHAK KEDUA** melakukan perbaikan yang diperlukan atas setiap kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Apabila dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tersebut, **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki setiap kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat:

1. atas beban **PIHAK KEDUA**, mengambil alih keseluruhan atau sebagian  Pekerjaan yang masih wajib diselesaikan (baik oleh **PIHAK PERTAMA** sendiri ataupun oleh pihak lain yang ditunjuk olehnya); dan / atau
2. mengakhiri Kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Lampiran ini.
   1. Penundaan Pembayaran – Dalam hal **PIHAK PERTAMA**  melakukan penundaan pembayaran berdasarkan ayat (1) Pasal ini, maka penundaan pembayaran tersebut akan berlanjut hingga kelalaian dan/atau kesalahan yang telah dinyatakan dalam Surat Peringatan telah  diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7 – KEHILANGAN**

* 1. Dalam hal terjadi kehilangan barang/peralatan/perlengkapan milik **PIHAK PERTAMA** akibat dari kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
  2. Bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa sebagaimana disebutkan dalam ayat 7.1 Pasal ini dapat berupa ganti rugi berupa barang/peralatan/perlengkapan, dan atau dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah **PIHAK**.
  3. Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam ayat 7.2 diatas harus dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 8 - KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Tidak ada satu **PIHAK** pun yang akan bertanggung-jawab terhadap **PIHAK** lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban akibat keadaan kahar (*force majeure*). Keadaan kahar adalah penyebab diluar kekuasaan **PIHAK** yang mengalaminya yang tidak dapat diperkirakan dan dicegah serta tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut berdasarkan Kontrak. Dengan tetap tunduk pada kriteria Keadaan Kahar sebagaimana diuraikan sebelumnya, Keadaan Kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada *act of God* (antara lain banjir, gempa bumi, tsunami, badai, angin topan, gunung meletus, tanah longsor atau wabah penyakit), peperangan, kerusuhan, sabotase, revolusi, perang (dinyatakan atau tidak), kekerasan, aturan masyarakat, kerusuhan sosial, kecelakaan, kebakaran, ledakan, embargo, atau karena dengan alasan undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah, atau tindakan Pemerintah lainnya, atau sebab apapun apakah yang bersifat sama atau berbeda.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat – lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang harus dapat dibuktikan, dan **PARA** **PIHAK** akan menyelesaikan akibatnya secara musyawarah.
3. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 x 24 jam, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi, kecuali **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dapat menunjukkan bukti yang memperlihatkan bahwa pemberitahuan telah dikirimkan sesuai waktu yang ditentukan.
4. Jika Keadaan Kahar berlangsung terus selama lebih dari 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan Keadaan Kahar diterima oleh **PIHAK** yang tidak mengalami Keadaan Kahar atau jangka waktu lain yang disepakati **PARA PIHAK**, maka dapat dilakukan pengakhiran Kontrak.

**PASAL 9 - PENYELESAIAN SENGKETA**

* 1. Perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan apapun mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran atau penafsiran ketentuan dan syarat manapun dari Perjanjian ini, akan diselesaikan sedapat mungkin secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**. Akan tetapi, dalam hal **PARA PIHAK** gagal menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa perselisihan akan diselesaikan secara final melalui arbitrase di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didirikan berdasarkan SK Kamar Dagang dan Industri Indonesia (“**KADIN**”) No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977/BANI Mampang (“**BANI**”), dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia. Keputusan para arbiter bersifat final.
  2. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan BANI, masing‑masing **PIHAK** harus menunjuk satu arbiter dan kedua arbiter tersebut harus menunjuk ketua arbiter. Jika dalam waktu dua (2) minggu setelah adanya pemberitahuan penunjukan arbiter oleh **PIHAK** lainnya salah satu **PIHAK** belum memberitahu **PIHAK** lain tersebut tentang pilihannya, arbiter kedua akan ditunjuk oleh **Ketua BANI**, yang juga akan menunjuk ketua apabila dua anggota yang ditunjuk tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan dalam pemilihan.
  3. Jika secara wajar dimungkinkan, Pekerjaan berdasarkan Kontrak wajib terus dilaksanakan sesuai Kontrak selama arbitrase berlangsung dan pembayaran yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** tidak boleh ditahan karena proses arbitrase tersebut, kecuali jika diwenangkan demikian oleh **PIHAK PERTAMA** atau diminta oleh arbiter atau majelis arbitrase.

**PASAL 10 - BAHASA YANG DIGUNAKAN**

Bahasa yang digunakan dalam Kontrak ini adalah menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris ataupun bahasa lain. Apabila terjadi perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah Kontrak yang berbahasa Indonesia.

**PASAL 11 - KETENTUAN AMANDEMEN**

Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, usulan atas perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan dan/atau pengesampingan atas ketentuan dalam Kontrak ini disampaikan secara tertulis dari satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya dan diterima oleh **PIHAK** lainnya tersebut sebelum berlakunya perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan dan/atau pengesampingan atas ketentuan dalam Kontrak tersebut, yang akan dituangkan dalam ***Amandemen*** atau dokumen lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 12 - PENGAKHIRAN KONTRAK**

1. Pengakhiran Kontrak Terkait Kelalaian dan/atau Kesalahan **PIHAK KEDUA**

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** memutuskan untuk mengakhiri Kontrak berdasarkan ketentuan Kontrak ini, termasuk berdasarkan Pasal 6 dan/atau Pasal 14 Lampiran ini maupun dalam hal diakibatkan oleh kecelakaan kerja dan/atau kecelakaan tambang kategori berat dan/atau fatal, maka:

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar segala sanksi dan denda berdasarkan Kontrak ini;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mencairkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** yang diberikan berdasarkan Kontrak ini**,** termasuk namun tidak terbatas pada jaminan pelaksanaan (*performance bond*); dan
3. **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran untuk bagian Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** sampai pada saat Kontrak diakhiri.
4. Pengakhiran Kontrak Atas Pilihan **PIHAK PERTAMA**
5. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Kontrak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat **30 (tiga puluh)** hari kalender sebelum tanggal pengakhiran tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri Kontrak dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat atau belum dapat memenuhi kondisi/syarat untuk dimulainya Pekerjaan, sesuai yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3.2 Kontrak Utama, dengan ketentuan bahwa pengakhiran Kontrak berdasarkan Pasal ini berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pengakhiran tersebut.
7. Apabila Kontrak diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.2 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengesampingkan semua tuntutan, gugatan, klaim dalam bentuk apapun atas kerugian karena pengakhiran tersebut, termasuk hilangnya laba yang diharapkan. Namun demikian, **PIHAK PERTAMA** harus membayar **PIHAK KEDUA**, setelah dikurangi setiap jumlah yang telah dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum terjadinya pengakhiran, semua tagihan atas pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak yang telah jatuh tempo sampai pada saat berakhirnya Kontrak, dengan ketentuan pembayaran tersebut berhak diterima oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak.
8. Pekerjaan Yang Tidak Diakhiri ‑ Dengan tidak mengurangi hal-hal yang disepakati dalam Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan setiap bagian Pekerjaan yang tidak diakhiri dan/atau belum selesai sebelum diakhirinya Kontrak ini sesuai dengan kesepakatan **PARA** **PIHAK** dalam Kontrak.
9. Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku dalam hal pengakhiran Kontrak akibat kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 13 – KETERPISAHAN**

Apabila satu atau lebih ketentuan dari Kontrak ini atau pengaturan yang tertera dalam Kontrak ini dinyatakan tidak sah, melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala hal berdasarkan setiap hukum atau keputusan yang berlaku, keabsahan, kesesuaian dengan hukum dan dapat dilaksanakannya ketentuan dan perjanjian lain yang tertera atau diatur dalam Kontrak ini tidak akan terpengaruh atau berkurang dalam hal apapun, dengan ketentuan bahwa, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, **PARA PIHAK** akan melakukan upaya terbaik mereka untuk merubah ketentuan yang tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan hanya sepanjang diperlukan untuk menjadi sah, sesuai hukum dan dapat dilaksanakan yang konsisten dengan maksud **PARA PIHAK**.

**PASAL 14 - KONFLIK KEPENTINGAN DAN PEMBAYARAN KOMISI**

1. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan setuju bahwa tidak ada orang atau badan hukum manapun yang dipertahankan atau dimanfaatkan untuk mencoba mendapatkan Kontrak ini dengan pembayaran komisi, upah atau kompensasi lain dalam bentuk apapun, kecuali untuk pembayaran kepada karyawan **PIHAK KEDUA** atau lembaga komersial yang dipekerjakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk tujuan mengamankan bisnis **PIHAK KEDUA** secara sah. **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyatakan bahwa baik **PIHAK KEDUA** maupun pemasoknya serta para staf, direktur, karyawan atau agen mereka masing-masing tidak pernah membuat, menerima, memberikan atau menawarkan, dan **PIHAK KEDUA** setuju bahwa baik **PIHAK KEDUA** maupun entitas atau orang lain tidak pernah membuat, menerima, memberikan atau menawarkan, hadiah, hiburan, pembayaran, pinjaman atau lainnya untuk tujuan mempengaruhi proses pengadaan peralatan atau bahan tertentu atau penerimaan subsupplier atau lainnya untuk tujuan mempengaruhi individu atau organisasi untuk bertindak dengan cara apapun yang berkaitan dengan atau untuk mempengaruhi Kontrak, atau penyerahan atau kinerja Barang, kecuali untuk pembayaran yang diizinkan oleh kalimat sebelumnya guna mendapatkan Kontrak.
2. Pelanggaran atas pernyataan dan jaminan tersebut di atas merupakan pelanggaran materiil terhadap Kontrak dan memberikan hak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk secara langsung mengakhiri Kontrak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12. **PIHAK KEDUA** berjanji akan menyertakan ketentuan yang serupa dengan ketentuan Pasal 14 ini dalam setiap perjanjian dengan sub-kontraktornya.

**PASAL 15 – HUKUM ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN**

Dalam melaksanakan Pekerjaan dan hal-hal yang diatur dalam Kontrak ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** ataupun setiap direktur, pejabat, atau perwakilan dari masing-masing **PIHAK** atau setiap agen, pegawai, afiliasi atau siapapun yang bertindak atas nama masing-masing **PIHAK** tidak telah atau tidak akan mengambil tindakan apapun dalam rangka membuat suatu penawaran, pembayaran, janji untuk membayar, atau otorisasi atau persetujuan atas pembayaran atau pemberian uang, properti, hadiah atau apapun yang bernilai, secara langsung atau tidak langsung, kepada pihak manapun untuk mempengaruhi tindakan resmi atau mengamankan suatu keuntungan yang tidak sepatutnya, termasuk untuk melakukan pembayaran atau memberikan sumbangan atau hadiah yang dilarang berdasarkan setiap peraturan perundangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku:

* 1. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan atau mengizinkan setiap penyuapan, memberikan potongan harga, pemberian imbalan, pembayaran guna mendapatkan pengaruh, pembayaran untuk memuluskan rencana, atau pembayaran lainnya yang tidak sah sehubungan dengan kegiatan usaha masing-masing **PIHAK**, dimana pembayaran tersebut dilarang berdasarkan peraturan perundangan atau kebijakan yang berlaku;
  2. Terlibat atau menjadi terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu praktek yang akan melanggar setiap ketentuan (baik dalam negeri maupun internasional) mengenai praktek korupsi; dan
  3. Melakukan dan akan terus melakukan usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait tindakan anti korupsi serta akan mengadakan dan mempertahankan kebijakan dan prosedur yang tunduk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan anti korupsi.